



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING**

Oleh :

ANGGUN SRI JAYENI
2220112015

Pembimbing :

Dr. Yoserwan.,S.H.,M.H.,L.LM

Dr.SyofiartiS.H.,M.HUM

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*

Anggun Sri Jayeni, Yoserwan, Syofiarti

ABSTRAK

Kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana *illegal logging* merupakan bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Tindak pidana *illegal logging* tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga berdampak luas terhadap kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta terganggunya keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang komprehensif, baik dalam aspek formulasi, aplikasi, maupun eksekusi. Untuk mempelajari lebih lanjut permasalahan dalam tesis ini Adalah : 1) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* dan penerapan menurut hukum positif di Indonesia?. 2) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap *illegal logging* dan penerapan sanksi pidana?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dimana pendekatan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. kebijakan hukum pidana dan penerapan menurut hukum positif dalam *Illegal Logging* di Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang cukup komprehensif untuk mengatur, mencegah, dan menindak kejahatan *illegal logging*. Pengaturan tersebut terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang secara tegas mengatur larangan terhadap perusakan hutan, penebangan tanpa izin, pengangkutan, dan perdagangan hasil hutan secara ilegal, serta menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pelanggarnya. 2. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *illegal logging* di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta peraturan lain yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut mengatur larangan, pertanggungjawaban pidana, serta ancaman sanksi berupa pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan, dan sanksi administrative.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, *Illegal Logging*, Penegakan Hukum, Kehutanan, Lingkungan Hidup

CRIMINAL LAW POLICY IN COMBATING ILLEGAL LOGGING

Anggun Sri Jayeni, Yoserwan, Syofiarti

ABSTRACT

Criminal law policy on overcoming illegal logging crimes is part of efforts to protect and manage forests sustainably in order to realize national development goals. Illegal logging crimes not only cause economic losses to the state, but also have a broad impact on environmental damage, loss of biodiversity, and disruption of ecosystem balance. Therefore, a comprehensive criminal law policy is needed, both in the aspects of formulation, application, and execution. To study further the problems in this thesis are: 1) How is the criminal law policy on overcoming illegal logging crimes and their implementation according to positive law in Indonesia?. 2) How is criminal law enforcement against illegal logging and the application of criminal sanctions?. This study uses a normative juridical method where the approach is based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this study. The results of the study show that: 1. criminal law policy and its implementation according to positive law in Illegal Logging in Indonesia have had various legal instruments that are quite comprehensive to regulate, prevent, and prosecute illegal logging crimes. These regulations are primarily contained in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, which expressly prohibits forest destruction, illegal logging, and the illegal transportation and trade of forest products, and establishes severe criminal sanctions for violators. 2. Criminal law enforcement against illegal logging in Indonesia is fundamentally based on a strong legal basis, established by Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction, and other regulations related to environmental protection. These provisions regulate prohibitions, criminal liability, and the threat of sanctions in the form of imprisonment, fines, additional penalties, and administrative sanctions.

Keywords: Criminal Law Policy, Illegal Logging, Law Enforcement, Forestry, Environment

